



RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, UKM

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya, maka "***Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi*** " Tahun Anggaran 2019 dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan rancangan awal dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2016 - 2021, yang berisikan 3 (Tiga) program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UMKM di Provinsi Jambi yang sumber pembiayaannya berasal dari dana APBD Provinsi Jambi.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Maret 2018

KEPALA DINAS

Drs. HARMEN RUSDI, ME
Pembina TK.I
NIP. 19650517 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43

BAB III TUJUAN DAN SARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	60
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018	61

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UMKM Tahun 2017 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2017 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2010-2015 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2016-2021. Mengingat dokumen RKPD tahun 2017 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Koperasi, UKM tahun 2016-2021 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam menyusun Rancangan Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah :

1.3.1 Maksud Penyusunan Rancangan Kerja

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi untuk satu tahun

mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi serta indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2019 , meliputi :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Jambi mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diakitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai 3 (Tiga) program pokok yaitu :

1. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan.
2. Program Peningkatan Daya Saing KUKM.
3. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

TABEL 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d 2017

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome (Hasil)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Priode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d Dengan Tahun		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
2 11 01 15	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	1. Persentase Penumbuhan UMKM 2. Persentase Perkembangan UMKM		3% 5%							
2 11 01 15 02	Penguatan Ekonomi Lokal	1. Meningkatnya pengetahuan program sertifikat hak atas tanah bagi PMK 2. Meningkatkan pemahaman tentang IUMK bagi warung KUBE	66 orang 75 orang	66 orang -	66 orang 75 orang	66 orang 75 orang	100 100	50 orang 40 orang	182 orang 115 orang	3 2	

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

		3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk halal UKM	40 orang	50 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	130 orang	3	
		4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi HKI produk UKM	40 orang	50 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	130 orang	3	
2 11 01 15 03	Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Koperasi	1. Meningkatnya kualitas SDM pengelola, pengurus koperasi primer dan sekunder	40 orang	20 orang	40 orang	40 orang	100	37 orang	77 orang	2	
		2. Meningkatnya kualitas SDM pengelola, pengurus dan pengawas koperasi OPD	-	-	-	-	-	43 orang			
2 11 01 15 04	Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	1. Meningkatnya pembiayaan dan permodalan bagi koperasi	-	-	-	-	-	20 pra koperasi			
		2. Meningkatnya kapasitas pembiayaan dan permodalan bagi pra koperasi	-	-	-	-	-	154 pra koperasi			
		3. Meningkatnya dukungan partisipasi untuk koperasi berkualitas dan berprestasi	-	-	-	-	-	20 koperasi			

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

2 11 01 16 01	Pengembangan produk unggulan/andalan di Provinsi Jambi	Berkembangnya desain serta terciptanya deversifikasi produk	125 umkm	115 umkm	125 umkm	125 umkm	100	65 umkm	305	2	
---------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----	---------	-----	---	--

2 11 01 16 05	Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya jumlah UKM yang melaksanakan program kemitraan	150 orang	125 orang	150 orang	150 orang	100	150 orang	425	3	
2 11 01 16 06	Bimbingan Teknis KUKM	1. Meningkatkan kinerja pengurus/pengelola koperasi 2. Meningkatkan jumlah koperasi yang berbadan hukum 3. Meningkatkan kualitas SDM pengurus dan pengelola terhadap SOP izin usaha KSP dan USP	150	150	150	150	100	22 orang 22 orang 22 orang	322	2	
2 11 01 16 09	Pengembangan promosi produk UMKM tingkat nasional, regional dan luar negeri	Meningkatnya jaringan pemasaran produk dan peningkatan pendapatan UKM	32 orang	30 orang	32 orang	32 orang	100	20 orang	82	3	

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

2 11 01 17 01	Pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi	1. Meningkatnya manajemen perkoperasian bagi koperasi masyarakat dan PPKL dan siswa sekolah	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100	200 orang	800	3	
		2. Meningkatnya manajemen perkoperasian bagi koperasi bagi masyarakat	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100	66 orang	116	5	
		3. Meningkatnya manajemen perkoperasian bagi koperasi dan PPKL	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	29 orang	89	3	
2 11 01 17 02	Pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi	1. Meningkatnya kualitas usaha koperasi	70 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	100	20 koperasi	160	2	
		2. Meningkatnya akses permodalan bagi usaha koperasi	33 koperasi	33 koperasi	33 koperasi	33 koperasi	100	20 koperasi	86	3	
2 11 01 17 04	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan bagi pengelola, pengurus dan pengawasan koperasi						20 koperasi			
		2. Meningkatnya koordinasi dan sharing program dalam pengawasan koperasi						60 orang			
		3. Meningkatnya kinerja						20 Koperasi			

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

		pengawasan internal USP koperasi lingkup Provinsi Jambi									
--	--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 11 01 17 05	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	1. Terlaksananya rapat koordinasi TIM Pengawasan terpadu 2. Terlaksananya rapat pembahasan hasil penilaian kesehatan KSP/USP						28 orang 28 orang			
2 11 01 17 06	Penerapan kepatuhan perundang-undangan perkoperasian	Meningkatnya kepatuhan aparaturnya dan pengurus koperasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan koperasi						50 orang			
		4.									

2.2 Analisis Pelayanan SKPD

Program pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

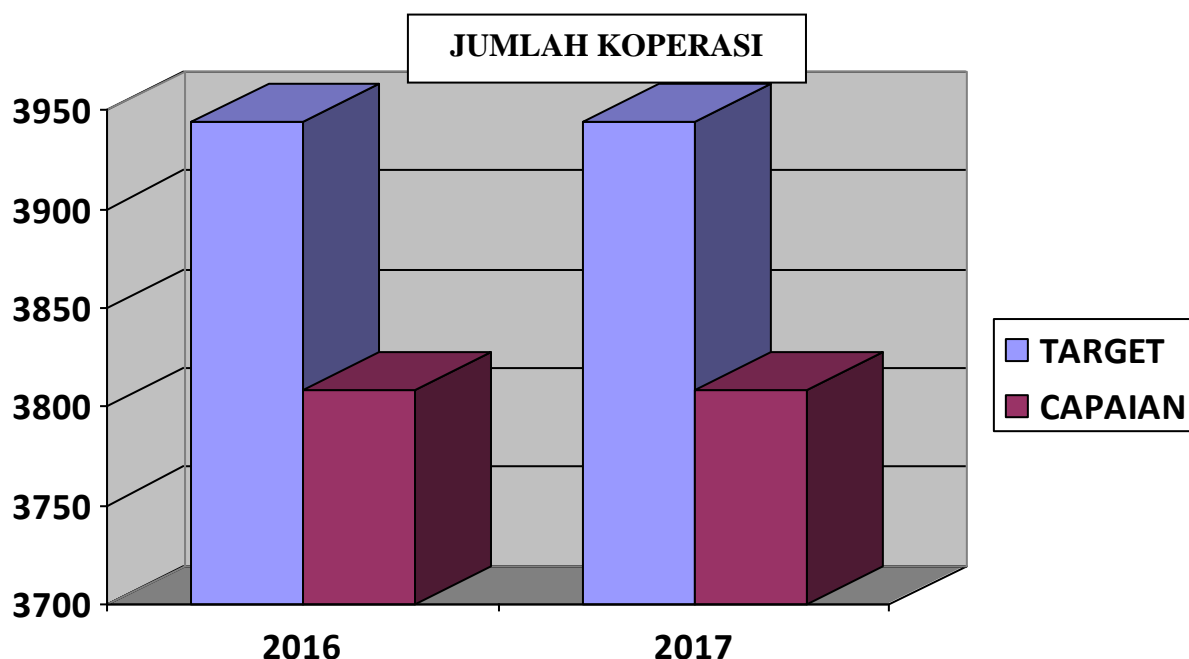
Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Jambi. adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Jambi. memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi.. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro. Hasil-hasil pembangunan sektor koperasi dan UMKM tercermin dari indikator makro seperti : PDRB, persen pertumbuhan koperasi, persen peningkatan kemitraan, pertumbuhan volume usaha.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
Data s.d Desember 2017

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Catatan Analisis
				2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perkembangan Permodalan Koperasi		Peningkatan Perkembangan Permodalan Koperasi	0,03 %	0,15 %	0,65 %	0 %	
2	Persentase Perkembangan Omset Usaha Kecil		Peningkatan Perkembangan Omset Usaha Kecil	0,10%	0,12%	0,30 %	0 %	
3	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UKM		Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja UKM	0,57%	0,57%	1,3 %	0 %	
4	Persentase Pertumbuhan UKM		Peningkatan Pertumbuhan UKM	0,10%	0,12%	13,5 %	0 %	
5	Persentase Pertumbuhan Koperasi		Peningkatan Pertumbuhan Koperasi	1,00%	1,15%	2,31 %	0 %	
6	Persentase Perkembangan Volume Usaha Koperasi		Peningkatan Perkembangan Volume Usaha Koperasi	0,30%	0,30%	0,05 %	0 %	



Berdasarkan grafik jumlah koperasi Tahun 2016 s.d 2017 di atas dapat di lihat per tahun, Tahun 2016 dengan target 3.944 koperasi dengan capaian 3.808 koperasi. Sedangkan Tahun 2017 Posisi Desember 2017 dengan target 3.944 koperasi dengan capaian 3.896 koperasi.

Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perkembangan koperasi di Indonesia antara lain :

1. Image koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.
2. Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down),artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Di Indonesia, pemerintah bekerja dobel selain mendukung juga harus

mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

3. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus.
4. Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
5. Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi "manja" dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan nya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraanya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal Kesadaran ini adalah pondasi utama bagi pendirian koperasi sebagai motivasi.

7. Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi. Itulah penyebab-penyebab kenapa perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal. Tetapi analisis masalah tadi bukan lah yang utama, justru yang utama jika ingin koperasi maju adalah sebagai generasi penerus bangsa di masa depan tentunya kita harus berperan aktif dalam pengembangan koperasi di negeri ini. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam koperasi, mempelajari dan mengetahui tentang perkoperasian secara lebih mendalam.

Tabel 3
Perkembangan Kelembagaan Koperasi 2016 s.d Desember 2017

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN	
		2016	2017
Perkembangan Koperasi			
Jumlah Koperasi	Unit	3.808	3.896
Koperasi Aktif	Unit	2.082	1.952
Koperasi Tidak Aktif	Unit	1.726	1.944
Jumlah Anggota	Orang	355.848	361.413
Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	604	646
Jumlah Pengurus	Orang	10.914	11.250
Modal Sendiri	Rp.	39.218.337.000	41.218.337.000
Modal Luar	Rp.	427.738.371.000	428.785.022.000
Volume Usaha	Rp.	2.014.707.710.000	2.015.707.845.000
SHU	Rp.	101.845.339.000	106.210.339.000

Berdasarkan perkembangan kelembagaan koperasi dari tahun 2016 s.d 2017 dapat diketahui jumlah perkembangan jumlah koperasi berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2017 datanya terjadi peningkatan dari Tahun 2016 hal ini dapat dilihat seperti tabel diatas.

Tabel 4
Perkembangan KSP/USP- Koperasi tahun 2016 s.d 2017

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN	
		2016	2017
<i>Perkembangan KSP/USP Koperasi</i>			
Jumlah KSP	Unit	99	99
Jumlah USP Koperasi	Unit	3.147	3.147
Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kop	Unit	268	268
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	1.000	1.000

Berdasarkan tabel perkembangan KSP/USP-Koperasi dari tahun 2016 s.d 2017 dapat dilihat, pada tahun 2017 datanya masih sama dengan perkembangan tahun 2016 hal ini disebabkan Dinas koperasi, UKM Kab/Kota belum mengirimkan data terbaru.

Tabel 5
Perkembangan UMKM tahun 2016 s/d Mei 2017

No	Perkembangan UMKM	Satuan	2016	2017
1.	Jumlah Usaha Mikro	Unit	85.684	87.669
2.	Jumlah Usaha Kecil	Unit	11.169	12.674
3.	Jumlah Usaha Menengah	Unit	1.252	555
4.	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Org	153.283	175.765
5.	Jumlah UKM	Unit	98.105	100.898

Berdasarkan tabel perkembangan UMKM Tahun 2016 s.d 2017 dapat dilihat jumlah usaha kecil sebesar 11.169 Unit, Jumlah usaha menengah sebesar 1.252 unit, jumlah tenaga kerja terserap sebesar 153.283 Orang, pada tahun 2017 data perkembangan UMKM mengalami perubahan, jumlah usaha kecil sebesar 12.674 Unit, Jumlah usaha menengah sebesar 555 unit, jumlah tenaga kerja terserap sebesar 175.765 Orang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama

oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan produksi.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

2.3.1. Kondisi Saat Ini

Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi pada saat ini dipengaruhi oleh :

- 1. Rendahnya produktifitas.** Produktifitas KUMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Rendahnya produktifitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan dibidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
- 2. Terbatasnya akses sumber daya produktif.** Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
- 3. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Hal ini disebabkan bahwa pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih

menekan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.

4. **Rendahnya kinerja Koperasi.** Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik koperasi.
5. **Kurang kondusifnya iklim usaha,** pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perizinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perizinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.2. Kondisi yang diharapkan

Untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di Propinsi Jambi pada saat ini sangat dipengaruhi :

1. **Produktifitas yang tinggi.** Untuk meningkatkan produktifitas perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya melalui manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan UMKM.
2. **Akses sumber daya produktif.** Peningkatan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.

3. **Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.** Koperasi harus menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance) agar koperasi dapat berkembang secara profesional.
4. **Peningkatan kinerja Koperasi.** Kinerja koperasi yang baik akan dapat membantu peningkatan usaha koperasi.
5. **Iklim usaha yang baik,** Iklim usaha yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu prosedur perizinan yang transparan, biaya transaksi perizinan yang murah, tidak adanya pungutan tidak resmi.

2.3.3. Kondisi Eksternal

1. Peluang

- Tersedianya regulasi yang mendukung perkembangan koperasi dan UMKM.
- Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan peluang pasar yang besar bagi produk-produk UMKM.
- Banyak program-program yang bergerak di sektor padat karya.
- Tersedianya skema kredit bagi koperasi dan UMKM
- Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru

2. Ancaman

- ✓ Kondisi infrastruktur (jalan, pelabuhan dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antar daerah dan negara.
- ✓ Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas).
- ✓ Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (entrepreneurship).
- ✓ Kualitas produk industri kecil dan menengah rata-rata masih rendah.
- ✓ Krisis ekonomi dan krisis finansial global yang bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia, termasuk Jambi.
- ✓ Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. Kondisi Internal

1. Kekuatan

- Adanya tupoksi dan program kerja Dinas Koperasi, UKM
- Adanya dukungan pembiayaan (APBD/APBN) dan kerjasama stakeholder terkait
- Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat digunakan untuk pengembangan koperasi dan UMKM
- Dukungan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD.

2. Kelemahan

- ✓ Keterbatasan tenaga fungsional dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan koperasi kepada masyarakat maupun gerakan koperasi.
- ✓ Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah.
- ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan terhadap gerakan koperasi dan UMKM
- ✓ Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan pengembangan dan program koperasi serta UMKM.

2.3.5. Isu Strategis yang dihadapi

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas

instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

2.3.6 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD Terkait Koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota

Program pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor koperasi dan UMKM.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Jambi adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang ada di Jambi, serta dalam menyusun program dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti Bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi nasional dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector koperasi dan UMKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pengembangan Koperasi dan UMKM dalam pelayanan kepada

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Selain dari hasil analisis di atas terdapat pula isu-isu penting lainnya yaitu :

- 1) Besarnya potensi Koperasi dan UMKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
- 2) Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
- 3) Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
- 4) Adanya akses kemudahan Perbankan dan pembiayaan lainnya bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
- 5) Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi, UMKM;
- 6) Adanya keanekaragaman produk UMKM yang tersebar;
- 7) Banyaknya usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan.
- 8) Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
- 9) Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;

10) Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;

11) Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;

Didasari isu-isu tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Provinsi Jambi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan potensi bidang Koperasi, UMKM untuk menangkap peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) Meningkatkan Produktivitas pelaku Koperasi, UMKM;
- 3) Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang Koperasi, UMKM dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini.
- 4) Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM;
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung dalam mengembangkan Koperasi, UMKM;
- 6) Meningkatkan kapasitas/kompetensi Sumber daya pelaku Koperasi, UMKM dalam mendukung keanekaragaman produk;
- 7) Meningkatkan Kerjasama dengan usaha besar dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM;
- 8) Meningkatkan Koordinasi Lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain ;
- 9) Meningkatkan mutu produk UKMM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global;
- 10) Mengembangkan potensi Koperasi dan UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global;
- 11) Meningkatkan Teknologi Produksi pelaku UMKM;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, UMKM Tahun 2017 disusun berdasarkan atas Renstra Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah. Sehingga dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Dinas Koperasi, UKM menetapkan 7 program prioritas yang terdiri atas 4 program pendukung dan 3 program pembangunan, serta menetapkan 43 Kegiatan prioritas yang terdiri dari 22 kegiatan pendukung dan 21 kegiatan pembangunan.

Program prioritas tersebut adalah :

- 1) Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan,
- 2) Program Peningkatan Daya Saing KUKM,
- 3) Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi,
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

Tabel 6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

No	Program Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				No	Program Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif			Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
I	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.824.105.009	I	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.878.093.680
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	3.750 lbr	81.191.000	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	780 lbr	3.740.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	12 Bulan	240.160.800	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	12 Bulan	372.000.000
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Keamanan dan Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	12 Bulan	2.783.000	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Keamanan dan Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	12 Bulan	2.300.000
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Keuangan	22 Orang	222.598.860	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Keuangan	40 Orang	420.316.000

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Kinerja Pelayanan dan Administrasi Rutin Kantor	68 Jenis	143.974.754	5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Kinerja Pelayanan dan Administrasi Rutin Kantor	68 Jenis	94.570.280
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparat Dinas Koperasi, UMKM	13 Jenis	50.022.126	6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparat Dinas Koperasi, UMKM	1 Tahun	30.837.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kondisi kenyamanan kerja Dinas Koperasi, UMKM	12 Buah 1 Paket	188.000.000	7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kondisi kenyamanan kerja Dinas Koperasi, UMKM	12 Jenis	43.662.000
8.	Penyediaan Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terjaganya Kebersihan Kantor	12 Bulan	111.575.189	8.	Penyediaan Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terjaganya Kebersihan Kantor	-	-
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Dinas Koperasi, UMKM	5 Jenis	5.808.000	9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Dinas Koperasi, UMKM	12 bulan	4.800.000
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Lancarnya Pelaksanaan rapat - rapat Dinas	90 Pegawai	30.250.000	10.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Lancarnya Pelaksanaan rapat - rapat Dinas	1 tahun	50.400.000

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

11.	Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	400 Orang	747.741.280	11.	Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	12 bulan	745.100.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	5.135.019.600	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	3.187.516.000
1.	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kinerja	1 Paket	1.800.000.000	1.	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kinerja	-	-
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Bertambahnya Aset/ Barang Inventaris untuk mendukung kelancaran kerja	-	300.000.000	2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Bertambahnya Aset/ Barang Inventaris untuk mendukung kelancaran kerja	-	-
3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Kenyamanan, Kelancaran Bekerja dan Pemeliharaan Kantor	12 Jenis	648.197.000	3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Kenyamanan, Kelancaran Bekerja dan Pemeliharaan Kantor	19 Jenis	385.400.000
4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Total	270.000.000	4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

5.	Pengadaan Komputer	Dinas Koperasi, UKM Prov.Jambi	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	22 Unit	239.943.000	5.	Pengadaan Komputer	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	5 jenis	146.000.000
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kinerja Aparatur	30 Unit	362.806.400	6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kinerja Aparatur	24 Unit	333.200.000
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatkan Kenyamanan dan Kelancaran Kerja	3 Jenis	129.373.200	7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatkan Kenyamanan dan Kelancaran Kerja	25 unit	109.600.000
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 Paket	84.700.000	8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	3 unit	374.175.000
9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 Paket	1.300.000.000	9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 gedung	1.435.001.000
						10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 paket	150.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase PNS yang Disiplin	100%	55.660.000	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase PNS yang Disiplin	100%	72.000.000

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terciptanya Keseragaman dan Kenyamanan Dalam Bekerja	115 Stel	55.660.000	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terciptanya Keseragaman dan Kenyamanan Dalam Bekerja	120 Stel	72.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	147.438.500	IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	80.850.000
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	92 Orang	147.438.500	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	1 tahun	80.850.000
V	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan		1. Persentase Penumbuhan UMKM	3%	4.269.749.800	V	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan		1. Persentase Penumbuhan UMKM	3%	1.734.694.000
			2. Persentase Pelembangan UMKM	5%					2. Persentase Pelembangan an UMKM	5%	
1.	Pengembangan UMKM melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM	90 UMKM	252.694.800	1.	Pengembangan UMKM melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	-	-	-
2.	Penguatan Ekonomi Lokal		1. Meningkatnya Keterampilan dan SDM UMKM.	200 UMKM	428.000.000	2.	Penguatan Ekonomi Lokal		1.meningkatny pengetahuan program sertifikasi hak atas tanah PMK	50 orang	178.725.000
			2. Meningkatnya Kesadaran UMKM untuk mengurus izin Usaha						2.meningkatny pemahaman tentang IUMK bagi warung KUBE	40 orang	

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

									3.terlaksananya kegiatan sosialisasi produk halal UKM	40 orang		
									4.terlaksananya keg sosialisasi HKI produk UKM	40 orang		
3.	Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP-Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan Gender.	55 Orang /2 kali	517.355.000	3.	Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP-Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola, pengurus koperasi primer dan sekunder	37 koperasi	122.041.000	
			2. Terakomodirnya Kebutuhan Permodalan bagi KSP/USP Koperasi dalam mengakses Sumber Pembiayaan	60 Orang / 2 kali					2. meningkatnya kualitas SDM pengelola, pengurus dan pengawas koperasi OPD	43 Orang		
			3. Meningkatnya Keterampilan Pengelola dan Pengawas Internal KSP/USP Koperasi.	20 Orang / 2 kali								
4.	Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terfasilitasinya Penerbitan Sertikat PMK di Kabupaten / Kota	66 Orang 400 Orang	535.500.000	4.	Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.Meningkatnya pembiayaan dan permodalan bagi pra koperasi	20 pra koperasi	194.258.000	
									2.meningkatnya kapasitas pembiayaan dan permodalan bagi pra	154 pra koperasi		

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

									koperasi 3.meningkatnya dukungan partisipasi untuk koperasi berkualitas dan berprestasi	20 koperasi	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya Kinerja KUMKM	36 orang	648.250.000	5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terciptanya data koperasi dan ukm yang akurat	11 kab/kota	239.670.000
				85 Koperasi 45 UMKM							
6.	Sosialisasi Pengembangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Meningkatnya Akses	110 Kop	887.950.000	6.	Sosialisasi Pengembangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	-	-	-
	Penguatan dan Perlindungan Koperasi		Pembiayaan dan Permodalan Bagi Koperasi				Penguatan dan Perlindungan Koperasi				
			2. Meningkatnya Kesadaran Penguatan perlindungan Terhadap Koperasi	110 Kop							
			3. Meningkatnya Keterampilan dan layanan Usaha	110 Kop							
			4. Meningkatnya Kualitas Produk dan Perluasan Akses Pasar	110 Kop							

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

			5. Meningkatnya Pemahaman Tentang Perundang-undangan	110 Kop							
7.	Peningkatan Daya Saing dan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. meningkatnya Usaha Koperasi	110 Kop	1.000.000.000	7.	Peningkatan Daya Saing dan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi		-	-
	UMKM		Dalam Rangka Mendukung Usaha Ketahanan pangan				UMKM				
			2. Meningkatnya Usaha Koperasi	110 Kop						-	
			3. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	110 Kop		8.	Pelatihan Pengelolaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.meningkatny kinerja pengawas / pengelola koperasi, usaha mikro kecil	220 orang	
									2.berkembangnya wawasan dalam meningkatkan kinerja koperasi dan UKM	220 orang	
									3.meningkatny SDM pengurus / pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan	44 orang	
									4.meningkatny tertib administrasi	220 orang	

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

								organisasi dan usaha koperasi			
								5.meningkatny wirausaha baru	88 orang		
								6.meningkatny a SDM tenaga pendamping	18 orang		
VI	Program Peningkatan Daya Saing KUKM		Persentase Produk yang Memenuhi Standard	2%	3.820.985.200	VI	Program Peningkatan Daya Saing KUKM	Persentase Produk yang Memenuhi Standard	2%	876.852.000	
1.	Pengembangan Produk Unggulan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Berkembangnya Desain serta terciptanya Diversifikasi Produk	125 UMKM	458.150.000	1.	Pengembangan Produk Unggulan	Berkembangnya Desain serta terciptanya Diversifikasi Produk	65 orang	208.998.000	
2.	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas Produksi dan SDM KUMKM	44 UMKM	528.489.200	2.	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi		1. Meningkatkan Kinerja Pengawas / Pengurus / Pengelola Koperasi	75 Orang	573.296.000		Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi	-	-	-	
			2. Berkembangnya wawasan dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi	75 Orang				-	-		

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

			3. Meningkatnya SDM Pengurus / Pengelola Koperasi dalam menyusun Laporan keuangan	100 Orang					-	-	
			4. Meningkatnya Tertib Administrasi Organisasi dan Usaha Koperasi	100 Orang					-	-	
3.	Sosialsasi HKI dan Label Halal bagi UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HKI dan Produk Halal Kepada UMKM dan Aparat	200 UMKM	423.800.000	3.	Sosialsasi HKI dan Label Halal bagi UMKM	Dinas Koperasi, UKM Prov. Jambi	-	-	-
4.	Pengembangan Kemitraan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan	150 UMKM	299.250.000	4.	Pengembangan Kemitraan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan	150 UMKM	97.400.000
5.	Bimbingan Teknis KUMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya SDM dan Daya Saing KUMKM	150 UMKM	200.000.000	5.	Bimbingan Teknis KUMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.Meningkatny kinerja pengurus/pen gelola koperasi 2.meningkatny jumlah koperasi yang berbadan hokum 3.meningkatny kualitas SDM pengurus dan pengelola terhadap SOP izin usaha KSP dan USP	22 orang 22 orang 22 orang	255.046.000

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

6.	Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas Produksi dan SDM KUMKM	150 UMKM	200.000.000	6.	Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	-	-	-
7.	Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Village One Product OVOP	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terciptanya Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan OVOP	100 Orang	188.000.000	7.	Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Village One Product OVOP	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	-	-	-
8.	Penyelenggaraan Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan Pendapatan UMKM	35 UMKM	950.000.000	8.	Penyelenggaraan Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan Pendapatan UMKM	20 orang	315.408.000
VII	Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas		3.181.061.500	VII	Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas		1.219.994.320
1.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Meningkatnya peran dan Pemahaman Perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi	300 Orang / 1 kali	734.955.000	1.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. meningkatnya manajemen perkoperasian bagi koperasi bagi masyarakat dan PKL dan siswa sekolah	200 orang	546.970.000

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

			2. Meningkatnya Pemahaman Tentang Koperasi bagi Kelp. Usaha Bersama & Kel. Masyarakat	25 Orang / 9 kali				2. meningkatnya manajemen perkoperasian bagi koperasi masyarakat	66 orang		
			3. Meningkatnya Peran Kelembagaan Koperasi bagi Pembina dan Gerakan Koperasi/Instansi Terkait	30 Orang / 9 kali				3. meningkatnya manajemen perkoperasian bagi koperasi bagi PPKL	29 PPKL		
			4. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi Berkualitas	24 Koperas i / 1 kali							
2.	Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Meningkatnya Peran Pengurus / Pengelola Koperasi dalam meningkatkan kinerjanya.	30 Orang / 8 Kab/Kot a	779.868.500	2.	Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.meningkatny kualitas usaha koperasi	20 koperasi	173.170.000
			2. Meningkatnya Partisipasi Anggota Koperasi.	30 Orang / 4 Kab/Kot a				2.meningkatny akses permodalan bagi usaha koperasi	20 koperasi		
			3. Meningkatnya dan berkembangnya Manajemen Usaha Koperasi.	33 koperasi & Pembin a / 2 Kali							

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

			4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengurus / Pengelola Koperasi. 5. Menguatnya Kualitas Usaha Koperasi.	12 Koperasi / 1 kali 70 Koperasi pembina & instansi terkait / 1 kali							
			6. Meningkatnya Usaha Koperasi dalam rangka mendukung Usaha Ketahanan Pangan.								
3.	Bimbingan Teknis KSP/USP-Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Tumbuh dan berkembangnya Koperasi / USP Koperasi di Kabupaten/Kota	77 Orang / 11 Kab-Kota 330 KSP/USP P-Kop Se-provinsi Jambi 84 Orang Se-Provinsi Jambi	399.938.000	3.	Bimbingan Teknis KSP/USP-Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	-	-	-

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

4.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkakan Kualitas	20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi	455.500.000	4.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.Meningkatny kepatuhan terhadap peraturan bagi pengelola, pengurus dan pengawasan koperasi 2.meningkatny koordinasi dan sharing program dalam pengawasan koperasi 3.meningkatny kinerja pengawasan internal USP koperasi lingkup provinsi jambi	20 Koperasi 60 orang 20 koperasi	237.100.000
			Kelembagaan dan usaha koperasi								
				55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota							
5.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi	415.600.000	5.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.terlaksananya rapat koordinasi tim pengawasan terpadu 2.terlaksananya rapat pembahasan hasil penilaian kesehatan kesehatan KSP/USP	28 orang 28 orang	137.682.320

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

6.	Penerapan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kesadaran Koperasi Dalam Memenuhi	20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	395.200.000	6.	Penerapan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1.meningkatny kepatuhan aparatur dan pengurus koperasi dalam penerapan peraturan perundang – undangan koperasi	50 orang	125.072.000
TOTAL					18.434.019.609	TOTAL					9.050.000.000